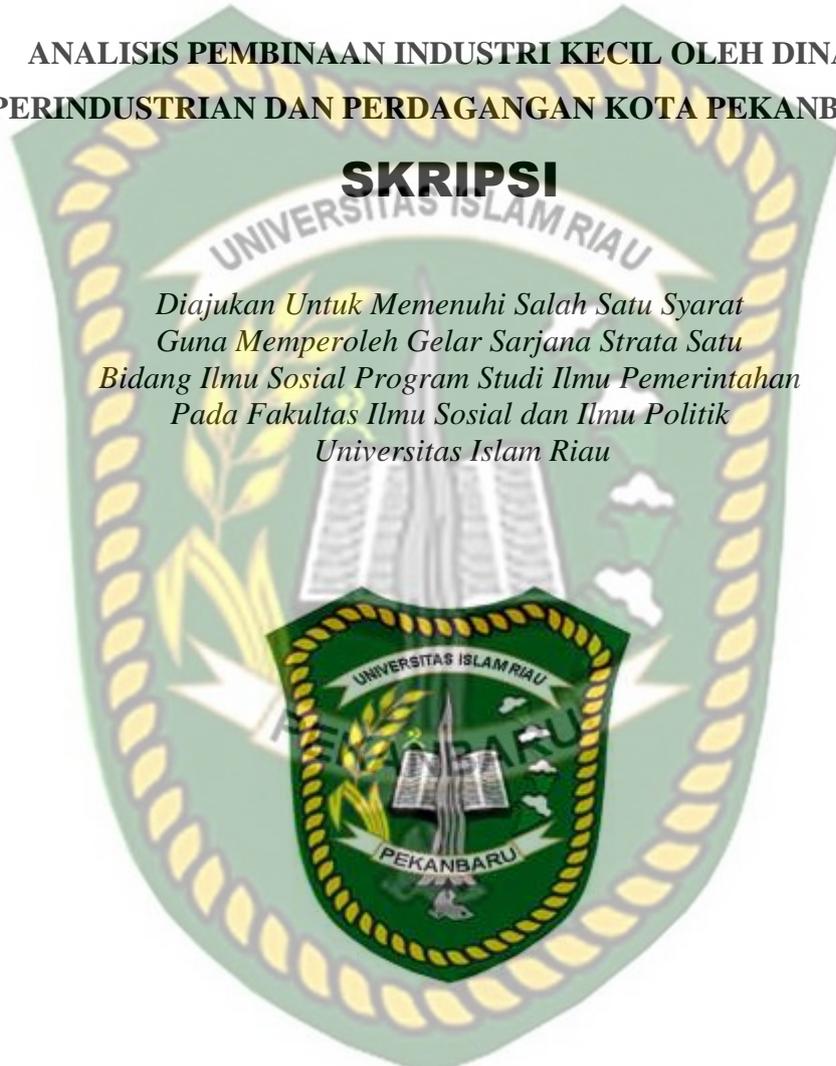


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



QASTHARI EFRAN QISTAN
NPM : 147310026

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Gasman Efrin Qistah
NPM : 147310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 26 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zaini Ali, M. Si


Andriyus, S. Sos., M. Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliarto, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Qasthari Efran Qistan
NPM : 147310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 April 2019

Ketua

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sekretaris

Sylvina Risadi, S.Sos., M.Si

Drs. H. Zaimi Ali, M. Si
Anggota

Andriyus, S.Sos., M.Si
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 20/UKF-UKIS/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 11 April 2019 jam 13.00 – 14.00 Wtb. bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Qasthari Efran Qistan
NPM : 147310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
Nilai Ujian : Angka : " 76,6 " : Huruf : " B + "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 368/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Meangingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 341/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR.
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : **Qasthari Efrai Qistan**
N P M : 147310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto,S.Sos.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Drs.H. Zaini Ali,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Andriyus,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri,S.Sos.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal 20 April 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----dk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Qasthari Efran Qistian
NPM : 147310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai Sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 26 April 2019
An. Tim Penguji

Ketua
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. Ip., M.Si

Sekretaris
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,
Budi Mulianto, S.IP., M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru“ tanpa halangan suatu apapun.

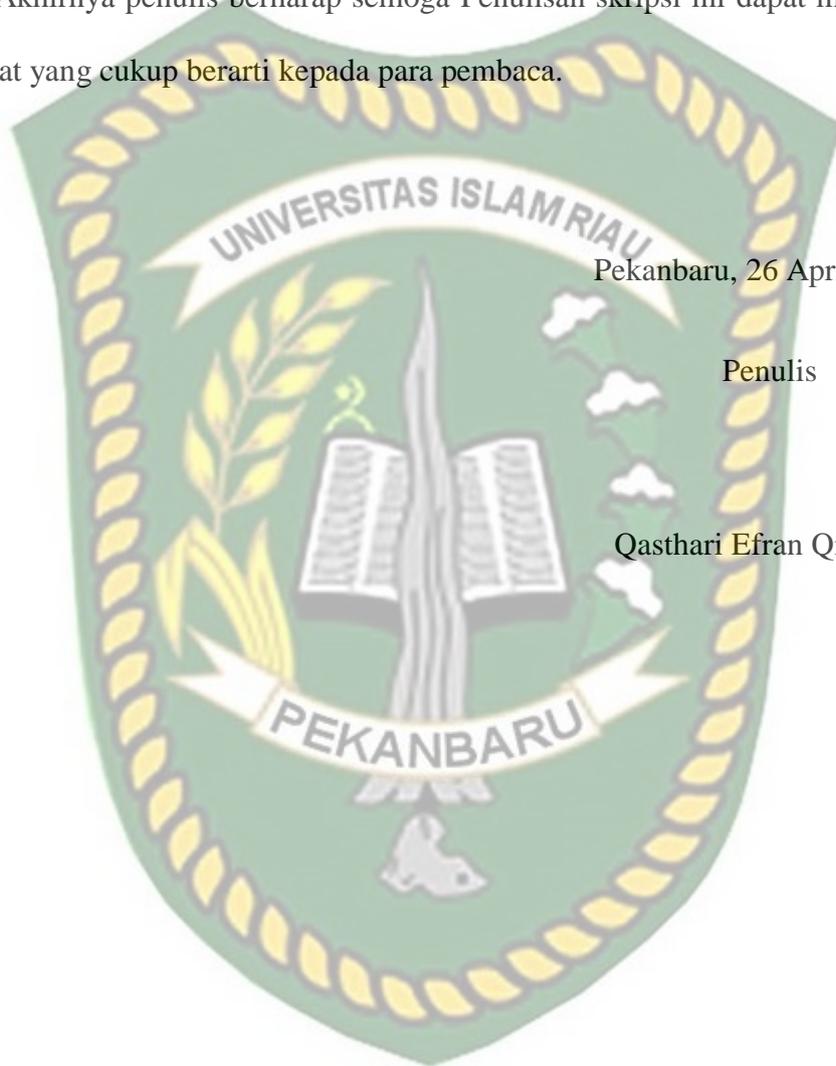
Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Budi Mulianto, S. IP., M. Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M. Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Andriyus, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
9. Terimakasih Kepada anggota Arbers Squad yang telah Banyak Membantu dalam Perjalanan Menuju Akhir Studi Penulis
10. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.



Pekanbaru, 26 April 2019

Penulis

Qasthari Efran Qistan

DAFTAR ISI

Halaman

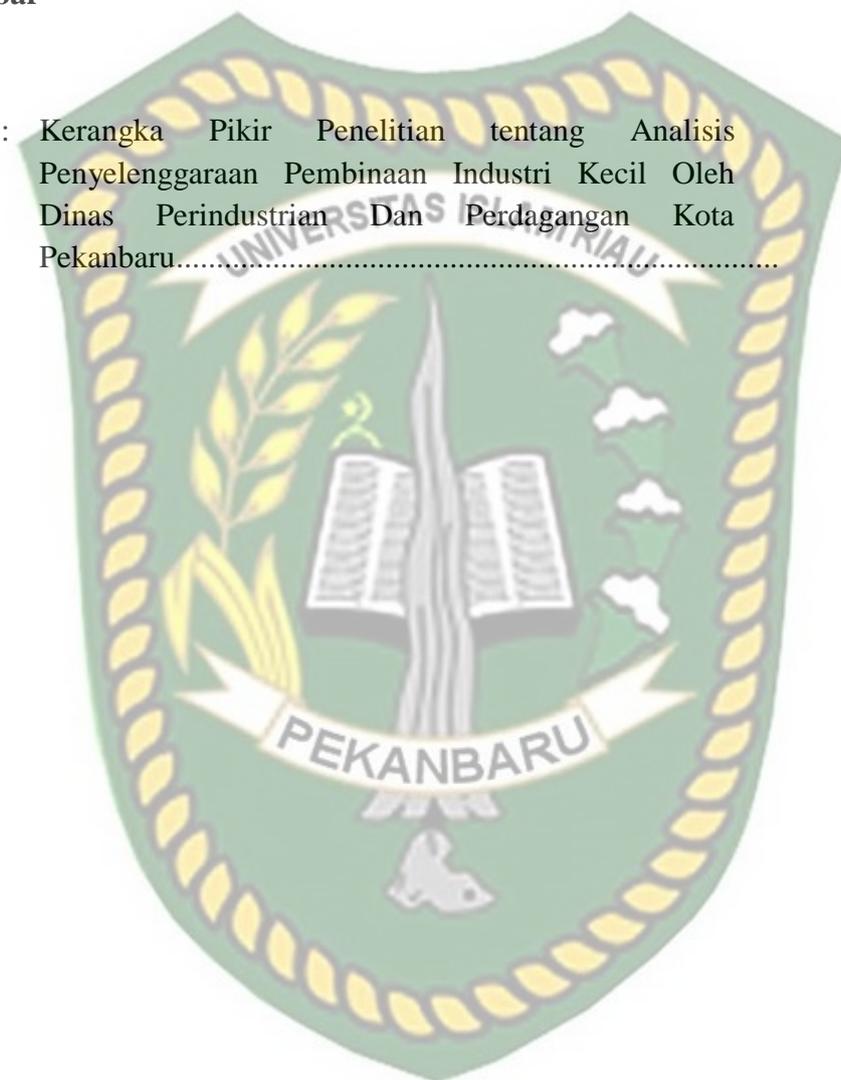
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK INDONESIA.....	xiii
ABSTRACK INGGRIS.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Teori Fungsi Pemerintahan.....	17
3. Organisasi.....	18

4. Manajemen.....	20
5. Manajemen Sumber Daya Manusia	23
6. Teori Kebijakan.....	26
7. Tugas dan Fungsi	29
8. Konsep Pembinaan.....	30
9. Konsep Industri	33
10. Industri Kecil.....	36
B. Kerangka Pikir	38
C. Hipotesis.....	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel.....	41
F. Teknik Pengukuran	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Sejarah Kota Pekanbaru	50
B. Letak Geografis.....	51
C. Kependudukan Kota Pekanbaru.....	52

D. Ekonomi Kota Pekanbaru	53
E. Sejarah Singkat Disperindag	53
F. Visi dan Misi Disperindag Kota Pekanbaru.....	55
G. Uraian Tugas Disperindag Kota Pekanbaru.....	56
H. Uraian Tugas Masing-masing Bidang Disperindag	60
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Identitas Responden	80
1. Tingkat Pendidikan Responden	80
2. Tingkat Umur Responden	86
3. Tingkat Masa Kerja Responden	87
B. Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	88
1. Pemberian Bimbingan.....	88
2. Supervisi.....	92
3. Konsultasi Urusan Pemerintahan	95
C. Hambatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	99
 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	 101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	101
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 103
 DOKUMENTASI	 105
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	8



SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qasthari Efran Qistan
NPM : 142310026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul SKRIPSI : Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah,
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 April 2019

Pelaku Pernyataan



Qasthari Efran Qistan

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

Qasthari Efran Qistan

147310026

Kata Kunci : *Pemberian Bimbingan, Supervisi, Konsultasi urusan pemerintahan*

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Untuk pembinaan industri kecil dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Permasalahan yang muncul yakni Belum maksimalnya pembinaan terkait pelatihan, penyuluhan, dan magang yang diadakan, dilihat dari keterampilan masyarakat tentang industri kecil yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam memberikan pelatihan, tidak semuanya bisa di aplikasikan oleh pelaku industri kecil dalam mengembangkan usahanya, dimana insdustri kecil yang dilihat yaitu berupa bentuk Industri Kelompok dan Individu yang sudah memiliki izin usaha yang terdata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui pembinaan Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan lokasi penelitian Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, survey, wawancara, dan kuesioner penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. berdasarkan hasil penelitian diketahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah baik dengan persentase 40,86%. Hal ini didasari dari kenyataan yang ditemui yakni a) pemberian bimbingan sudah cukup baik. b) supervisi berada pada kategori cukup baik. c) Konsultasi urusan pemerintahan berada pada kategori baik.

**ROLE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE IN
DEVELOPING SMALL INDUSTRIES IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Qasthari Efran Qistan

147310026

Keywords: Giving Guidance, Supervision, Consultation Government

The role is defined as a behavior that is expected from or has been established for the government as an administrator at every level of government. To foster small industries carried out by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City. Problems that arise are not yet maximally coaching related to training, counseling, and internships held, judging from the community's skills about small industries which are fostered by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City in providing training, not all of them can be applied by small industries where small industries are seen, namely in the form of Industrial Groups and Individuals who already have business licenses recorded at the Pekanbaru Industry and Trade Office. Thus, the purpose of the study was to find out the development of Small Industries by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City.

This type of research is a descriptive survey with the research location of the Office of Industry and Trade of Pekanbaru City. Types and sources of data used primary data and secondary data, while collecting data through the results of observations, surveys, interviews, and research questionnaires. After the data is obtained then grouped according to its type in a table, then the data is analyzed and linked to theories in the form of descriptions so that conclusions can be taken. Based on the results of the study it is known that the role of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City has been good with a percentage of 40.86%. This is based on the reality encountered, namely: a) the provision of guidance is good enough. b) supervision is in a fairly good category. c) time is in the good category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Tujuan dari negara Kesatuan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara alenia ke empat, yaitu: “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut Undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam betuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa,
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan informatika,
- 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah,**
12. Penanaman,
13. Penanaman modal,
14. Kepemudaan dan olahraga,
15. Statistik,
16. Persandian,
17. Kebudayaan,
18. Perpustakaan,
19. Kearsipan.

Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pertanian,
3. Kehutanan,
4. Energi dan sumber daya mineral,
5. Pariwisata,
- 6. Industri,**

7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian.

Salah satu dari Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terletak antara 0°28'53,5 LU dan 101°28'23,7 BT dengan luas wilayah ±632,3 Km². Kota Pekanbaru terdiri 12 Kecamatan, 83 Desa/Kelurahan, 609 RW, dan 2.589 RT dengan jumlah penduduk 1.011.467 jiwa terdiri dari 519.515 jiwa laki-laki dan 491.952 jiwa perempuan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, memberikan izin dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Peraturan Pemerintahan yang berlaku.
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan dibidang industri dan perdagangan.

- e. Pembinaan, pengaturan dan peningkatan kebijaksanaan serta pemberian izin Perindustrian dan Perdagangan.

Pemberian pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan industri kecil, kerajinan rumah tangga, pertenunan dan tekstil, industri logam dan pengecoran besi, industri penyepuhan logam dan sektor industri lain berdasarkan skala prioritas dan pengevaluasian dan peloporan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016, maka struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Metrologi
 - 2) Seksi Pengawasan Perdagangan
 - 3) Seksi Pengawasan Perindustrian
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
 - 2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - 3) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
- e. Bidang Pasar Membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
 - 2) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
 - 3) Seksi Retribusi
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri**
 - 2) Seksi Sarana dan Usaha Industri
 - 3) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut memudahkan Dinas atau Instansi terkait dalam Pembinaan Industri Kecil. Adapun yang menangani berkaitan dengan Pembinaan Industri Kecil terdapat pada Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri yaitu pada Seksi Aneka Industri Kerajinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Berdasarkan Perwako Nomor 114 Tahun 2016 Pada Pasal 25 ayat (2) Bidang Perindustrian memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan dibidang Industri
- b. Penetapan Bidang Industri Prioritas dan Unggulan
- c. Pemberian Pelayanan Teknis Terhadap Kelancaran Pengadaan dan Penanganan bahan Baku maupun Penolong
- d. Promosi Produk Industri
- e. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Industri
- f. Pemberian Fasilitas dan Pengawasan Standarisasi
- g. Penerapan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), Industri dan Pembina Industri.
- h. Pelaksanaan Fasilitas Akses Permodalan.
- i. Pemberian Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama.
- j. Pemberian fasilitas Usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah UKM serta Industri Kreatif
- k. Pemberian Perlindungan Kepastian Berusaha terhadap Industri
- l. Penyusunan tata ruang Industri
- m. Pembinaan Insustri dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan Oleh Industri,
- n. Pendataan, Menganalisis dan Desiminasi data Industri
- o. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Industri
- p. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Industri di Kota Pekanbaru sangat banyak dan perlu dilakukan pembinaan dari pemerintah serta masyarakat luar, agar industri yang ada bisa berkembang dengan baik. Jenis industri yang sudah masuk kedalam program pengembangan pemerintah daerah dan ada juga yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya adalah industry kecil, beberapa jenis perdangan dan perindustrian kecil yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan data dari Dinas yang didapat yaitu dari tahun 2002 hingga 2017, tetapi penulis hanya menguraikan bagian 3 tahun terakhir saja dimana yang penulis anggap masih bisa dijadikan data normal dan masih baru serta layak untuk dijadikan pedoman. Adapun jenis perdangan dan perindustrian kecil yang ada di Kota Pekanbaru dari Tahun 2015 hingga sekarang 2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I.1 Jenis Perdangan dan Perindustrian Kecil yang ada di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Nama Usaha	Pemilik	Alamat	Komoditi
1.	2015	Siak Wasilah	Sumarni	Jl. Siak Kel. Air hitam kec. Tenayan raya	Aneka Kue
2.		Indah Jaya	Sulasmi. N	Jl. Sumatera kel. Sailki kec. Tenayan raya	Aneka Kue
3.		Rumbai Bukit Quilting	Rahima	Jl. Sri palas kel. Rumbai bukit kec. Rumbai	Quilting
4.		Istana Durian	Yasni Santi	Jl. Melati el. Delima kec. Tampan	Dodol Durian
5.		Excel Furniture	Dede Surohman	Jl. Fajar Ujung Gg. Rela Jaya Labuh Baru Barat Payung Sekaki	Industri Furniture Dari Kayu : Sofa, Kursi, SpringBed

6.		Berlin	H. Syafri	Jl. Kartini No. 43 Sumahilang Pekanbaru Kota	Penjahit
7.		Sofie Ja'it	Mahfurin	Jl. Zebra No. 8 Sukajadi	Penjahit
8.		Empat Bersaudara	Alam	Wonorejo, Marpoyan Damai	Servis
9.	2016	Sumber Sukses	Sariato	Jl. Budi luhur kel. Kulim kec. Tenayan raya	Keripik Ubi
10.		In Collection	Indra Lesmana	Jl. Utama / Nenas No. 72/74 A Kampung Tengah Sukajadi	Tas, Ransel
11.		Pangeran Mas Tailor	A. Yatino Santoso	Jl. T. Zainal Abidin No. 14 D Kota Tinggi Pekanbaru Kota	Penjahit
12		Mitra	Hamdani Leo Mulo	Jl. Kh. Ahmad Dahlan Gg. Sempena no. 73 , Sukajadi	Penjahit
13		UD. Kenari	Dody Fachry	Jl. Khayangan No. 76, Meranti Pandak, Rumbai Pesisir	Roti dan Kue
13.		2017	Kampung Melayu	Susi	Jl. Ketitiran kel. Kampung melayu kec. Sukajadi

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada beberapa perindustrian kecil dan perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki izin usaha. Pada Tahun 2015 ada empat jenis perdagangan dan perindustrian kecil yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu usaha ibu sumarni dengan komoditi aneka kue, ibu sulasmi dengan komoditi aneka kue, ibu rahima memiliki usaha quilting, dan ibu yasni memiliki usaha dodol durian. Sedangkan di Tahun 2016 hanya ada satu perindustrian dan perdagangan yaitu usaha bapak sariato dengan usaha keripik ubi, dan pada Tahun 2017 ada satu usaha yang

terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu usaha menjahit yang dimiliki oleh ibu susi.

Dari beberapa potensi industri kecil dan perdagangan di Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah melakukan pembinaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Data Program Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Program Pembinaan	Waktu dan Tempat	Peserta
1	2	3	4
1.	Pelatihan	3 Maret 2016 di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, dan keripik ubi.
2.	Penyuluhan	15 april 2015 di aula Kanto Camat Payung Sekaki	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi,
3.	Pemberian Pedoman	2 Juni Pemberian Buku Pedoman kepada setiap pelaku usaha industri kecil dan menengah setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi
4.	Pengarahan	Pengarahan dilakukan setiap setelah ada buku pedoman, mengadakan pelatihan dan pemberian bimbingan	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi,
5.	Pemberian Bimbingan	2 Juni 2016 pemberiak buku petunjuk juklak juknis untuk industri kecil dan menengah	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi,
6.	Konsultasi Pelaksanaan	7 agustus dan setiap akan mengadakan kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

	Urusan Pemerintahan	pelatihan, bimbingan, penyuluhan serta pemberian bimbingan mengadakan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan	Pekanbaru
7.	Supervisi	Pengawasan langsung Pengawasan langsung Dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru setiap setelah mengadakan suatu acara program Pembinaan	Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi,

Sumber: Dinas Perindustrian & Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan pra survey penulis temukan pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, sehingga dapat dinilai masih ditemukan permasalahan, diantaranya fenomena-fenomena yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan terkait Pelatihan, Penyuluhan, Magang yang diadakan dilihat dari keterampilan masyarakat tentang Industri Kecil yang di bina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan, tidak semuanya bisa di aplikasikan oleh pelaku industri kecil dalam mengembangkan usahanya, dimana insdustri kecil yang dilihat yaitu berupa bentuk Industri Kelompok dan Individu yang sudah memiliki izin usaha yang terdata pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
2. Pengetahuan tenaga pendamping terhadap industri kecil kepada pelaku industri kecil seperti kegiatan pelatihan, promosi, bantuan peralatandan pemasaran belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku industri kecil yang dilihat dari teknik dan cara pengemasan oleh industri kecil dalam memasarkan hasil produksinya.

Dari permasalahan dan fenomena-fenomena yang telah di uraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”*.

B. Perumusan Masalah

Apabila dilihat dari permasalahan diatas, Industri Kecil yang berada di Kota Pekanbaru khususnya di bisa dikatakan baik. Sehingga diperlukan Pembinaan secara maksimal. Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan yang baik diperlukan peran dari Pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinasikannya. Mencermati kondisi atau gejala tersebut dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini sebagai berikut : *“Bagaimana Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru?”*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan :

- a. Untuk mengetahui pembinaan industri kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan pembinaan industri kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan penulis, yang terjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan minimal dapat memperkaya inventaris hasil hasil penelitian dibidang Ilmu Pemerintah pada umumnya, khusus pelaksanaan pembinaan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil secara maksimal.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong (dalam Drs. Inu Kencana Syafie, M.Si, halm. 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (Drs. Inu Kencana Syafie., M.,Si hal 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislati, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Budiarto (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintatah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3).

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

2. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rsyid (dalam Labobo, 2006 :26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai

aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

4. Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan

pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

6. Teori Kebijakan

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*), konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menempati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto, 2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*,

menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja beralih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah klembagaan pemerintah.yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public polcy*)
- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Medel sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemrintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut Mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam Nurcholis, 2005:158).

Menurut Nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

7. Tugas dan Fungsi

Menurut Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Winardi (2003:34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota

organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

8. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurut Miftah Thoha (2010 : 207)

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu, (Miftah Thoha, 2008 : 207) dimana unsur pembinaan itu ada 2 (dua) :

1. Pembinaan bisa berupa Proses, atau pernyataan tujuan
2. Pembinaan bisa menunjuk kepada "Perbaikan" atas sesuatu

Menurut Pedoman pembinaan dan pengawasan Tahun 2007 Pasal 2 ayat c:

- 1) Pemberian Bimbingan
- 2) Supervisi
- 3) Konsultasi Pelaksanaan urusan pemerintahan

Sedangkan menurut Ismail (2001 ; 154) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut Ismail (2001 ; 167-168) menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dengan mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menterjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah.
3. Dengan mengadakan pertunjukan atau demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi . Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusus yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (Badudu, 2002:316) bahwa “pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayagunadan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki).

Pengertian Pembinaan Menurut PsikologiPembinaan dapat diartikan sebagai upayamemelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukandengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai denganrencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Menurut Saydam (2000:408) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Nawawi pembinaan itu dilakukan dengan :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.
2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain.
4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode atau cara dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya. (Nawawi, 2005:111).

Arti pentingnya pembinaan menurut Nurcholis (2005:133) adalah sbb:

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d. Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
- f. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja

Sedangkan Santoso (1988 : 291) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lainnya :

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian Motivasi
- c. Pengembangan Karier
- d. Memberi Penghargaan

Selanjutnya juga dapat dilihat menurut Karyadi (2003 : 12) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain :

1. Pemberian Petunjuk
2. Pemberian Pendidikan dan Latihan
3. Pemberian Bimbingan

Menurut Sondang Siagian (2012:125) Pembinaan tim adalah penentu tujuan atau sasaran, pengembangan hubungan interpersonal diantara para anggota tim, abalisis peranan yang dimaksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim yang antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan peningkatan koordinasi dan analisis proses tim.

Menurut Kusnadi (2005:246) pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkat keahliannya, pengetahuannya atau sikap guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Musanef (1998:16) tujuan dari pembinaan itu adalah :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerinthan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu
- d. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada pancasila
- e. Diwujudkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja serasi
- f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur
- g. Diarahkan pada pembinaan system kerja

9. Konsep Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan

yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.
2. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

10. Industri Kecil

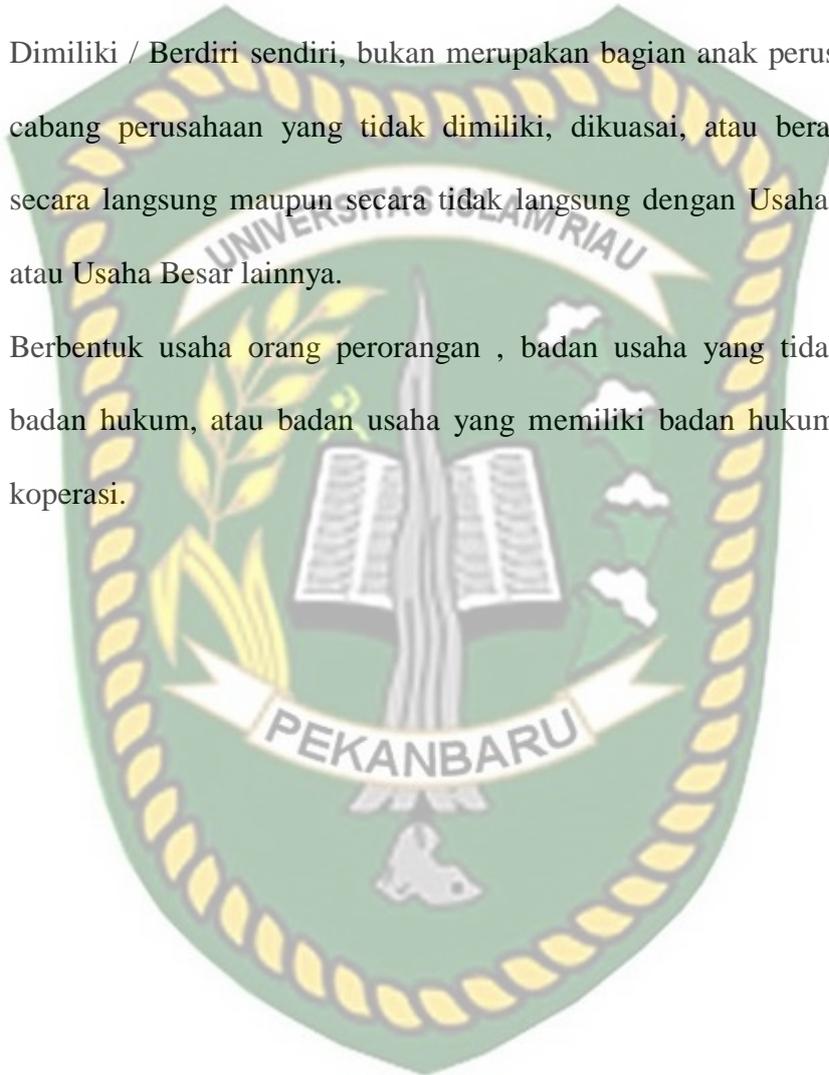
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, perubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik (1993: 53) industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (Sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
3. Dimiliki Warga Negara Indonesia.
4. Dimiliki / Berdiri sendiri, bukan merupakan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar lainnya.
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, atau badan usaha yang memiliki badan hukum, termasuk koperasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Pikir

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru



Sumber: Olahan Penelitian, 2018

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai jawaban rumusan sementara maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara atau hipotesis jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugasnya baik dalam membina Industri Kecil, maka bakat yang dimiliki oleh masyarakat tentang industri kecil akan berjalan lebih baik.

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dinas yang dibentuk oleh pemerintah Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Pemerintahan adalah sebagai badan atau lembaga-lembaga dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati seluruh ketentuan hukum dalam batas wilayah negara, baik oleh setiap warga Negara secara perseorangan maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan dalam pembinaan industri kecil.
3. Industri kecil adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang digolongkan kepada industri kecil dan industri rumah tangga dengan memberikan bantuan modal usaha dan penyuluhan dalam meningkatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
4. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan terhadap perekonomian masyarakat dibidang perdagangan dan perindustrian yang ada di Kota Pekanbaru, meliputi :

- a. Pemberian bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam upaya seperti dalam bentuk menunjuki, upaya mengiring, dan upaya mendorong Industri kecil di Kota Pekanbaru.
- b. Supervisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam bentuk pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, seperti setelah melakukan pembinaan berupa pelatihan, penyuluhan, lalu dilakukan bimbingan serta diawasi jalannya usaha industri kecil tersebut.
- c. Konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koordinasi antara industri kecil kepada pihak Dinas dalam rangka melaksanakan program pembinaan tersebut, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara yang membina dan yang dibina.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat dilihat operasionalisasi variabel yang meliputi konsep pembinaan dengan melihat indikator pelatihan, pendampingan, sosialisasi peraturan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu, (Miftah Thoha, 2008 : 207)	Pembinaan Industri Kecil Menurut Pedoman pembinaan dan pengawasan Tahun 2007 Pasal 2 ayat c :	Pemberian Bimbingan	a. Adanya upaya memberikan petunjuk b. Adanya upaya mengajak c. Adanya upaya memberikan saran.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Supervisi	a. Keseriusan Peserta b. Motivasi dan partisipasi c. Pengawasan langsung & tidak langsung	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Konsultasi Pelaksanaan urusan Pemerintahan	a. Komunikasi dari atasan dengan bawahan b. Komunikasi yang dibina dengan yang membina	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Penelitian, 2018

F. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator dengan menilai variabel pelaksanaan pembinaan Industri Kecil sebagai berikut :

- Baik** : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil telah melaksanakan empat indikator yang terdiri dari adanya pelatihan, pendampingan, magang/studi banding, dan sosialisasi peraturan atau jawaban responden berdasarkan tabel rekapitulasi berkisar antara 67 – 100 %
- Cukup Baik** : apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri kecil hanya melaksanakan tiga dari empat indikator yang terdiri dari empat indikator yang terdiri dari pelatihan, pendampingan, magang / studi banding dan sosialisasi peraturan atau jawaban dari responden berdasarkan tabel rekapitulasi berkisar antara 34 – 66 %
- Kurang Baik** : apabila dalam pelaksanaan pembinaan industri kecil hanya melaksanakan kurang dari tiga indikator yakni adanya pelatihan, pendampingan, magang / studi banding dan sosialisasi peraturan atau jawaban responden berdasarkan tabel rekapitulasi berkisar antara 0 – 33 %

Adapun item pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator variabel pembinaan, dipergunakan pengukuran sebagai berikut :

- a. Pemberian Bimbingan

- Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi memberikan petunjuk, mengajak, serta memberikan saran kepada orang rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67 – 100 %
- Cukup Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil hanya memberikan tiga dari empat bentuk pembinaan rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34 – 66 %
- Kurang Baik : Apabila dalam pelaksanaan Industri Kecil hanya memberikan satu saja atau tidak memberikan Pelatihan rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 0 – 33 %
- b. Supervisi
- Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil telah melakukan pembinaan pendampingan berupa semangat, dukungan, serta harapan-harapan yang akan dicapai dari pengurus Industri Kecil agar pelaksanaan tugas dan fungsi sejalan dengan cita-cita organisasi Industri Kecil Kabupaten Rokan Hilir atau rekapitulasi berkisar 67-100 %
- Cukup Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil hanya memberikan pembinaan dalam bentuk pendampingan 2 dari 3 rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34 – 66%

Kurang Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil hanya memberikan pembinaan dalam bentuk pendampingan 1 dari 3 bentuk pendampingan atau tidak sama sekali atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 0-33%

c. Konsultasi Pelaksanaan urusan pemerintahan

Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil telah melakukan pembinaan magang / studi banding berkisar antara 67 – 100 %

Cukup Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil hanya memberikan pembinaan magang / studi banding 2 dari 3 kegiatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67 – 100%

Kurang Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil hanya memberikan pembinaan pendidikan dan latihan 1 dari 3 kegiatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 0 – 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Didalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Dan penelitian survey ini akan menuntun sipeneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisisioner yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2012 : 25). Metode penelitian adalah metode Kuantitatif dan Kualitatif

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lokasi penelitian, karena dilihat dari perkembangan industri yang semakin pesat, sehingga dapat dilihat bahwa salah satu tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pembinaan adalah agar masyarakat setempat tidak ketinggalan dengan pesatnya industri di Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Aneka Industri	1	1	100%
3.	Kepala Seksi Industri	1	1	100%
4.	Industri Kecil	14	14	100%
Jumlah		17	17	100%

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif sedikit, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil sampel yang terkait dengan masalah pembinaan. Sehingga teknik penarikan sampel untuk Kepala Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri, Kepala Seksi Aneka Industri, Kepala Seksi Industri Tekstil Kimia Kota Pekanbaru dan reponden industri kecil menggunakan teknik penarikan *sensus* yaitu penetapan sampel diambil dari seluruh jumlah responden.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa data tentang Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari :

- a. Identitas Responden
- b. Pembinaan Industri Kecil Oleh Seksi Aneka Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berupa pelatihan, pendampingan, magang / studi banding dan sosialisasi peraturan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis dan penduduk.
- b. Keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat.
- d. Keadaan sarana dan prasarana.
- e. Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- f. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisioner, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada responden sebagai sampel terpilih.

2. Observasi, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan langsung kelapangan untuk melihat secara langsung pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.
4. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada Responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan Kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika akan diterapkan Kepada informan atau orang – orang atau responden yang dijadikan sampel dan banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian dianalisa secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian untuk melihat Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat oleh Seksi Aneka Industri Kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.11 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x																
2	Seminar UP					x															
3	Revisi UP						x	x													
4	Revisi Kuisisioner								x	x	x										
5	Rekomendasi Survey											x	X	x							
6	Survey Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data															x					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																			x	
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																			x	x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari perdataman dan dataran tinggi Minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke – 18, wilayah Senapelan di tepi sungai siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah “ Dewan Menteri ” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan kemudian hari diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Besluit van Het Islandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan menjadi Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus Landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 nomor 103, pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang – Undang No. 8 tahun 1956 Republik Indonesia, pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 Republik Indonesia, pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau)

B. Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat Industri, pusat pelayanan jasa dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara. Terletak antara 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' - 0 45' Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan dengan daerah, sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sebelah selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan Sebelah Timur : Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 07 September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² yang terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dengan 58 kelurahan/desa.

Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak dijalur lintas timur pulau Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatera memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dan daratan yang mudah untuk dikembangkan. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan roda pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2004.

C. Kependudukan Kota Pekanbaru

Dengan pertumbuhan penduduk 3.2%, Kota Pekanbaru merupakan Kota berpenduduk 1.011.467 (sensus 2014) dan menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

D. Ekonomi Kota Pekanbaru

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp and paper, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Pertumbuhan ekonomi ini mencapai 23 angka 3,82% pertahun, dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, dan elektronika, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di Kota Pekanbaru ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru. Indikator pertumbuhan ekonomi ditunjukkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, Pinjaman dan Pelayanan Bidang Ekonomi.

E. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain yaitu Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru dan Tahun 1996 : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru.

Pada Tahun 2001 pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan

Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Disperindag). Dan pada awal tahun 2017 namanya dirubah kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau yang disingkat menjadi DPP. Perubahan ini terjadi bukan 20 Dokumen dan Arsip Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 24 dari namanya saja, tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas tersebut. Adapun nama-nama pegawai yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. H. Amir Husin
2. Drs. H. Kastalani Rahman, M.Si.
3. H. Suraji, SH.
4. Ir. Hj. El Syabtina, MP.
5. Drs. H. Azwan, M. Si.
6. Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut (Sekarang Menjabat)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beralamat di jalan Teratai NO. 83, Telp. (0761) 21699 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

F. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industry yang mapan guna menunjang ekonomi kerakyatan.

2. Misi

- a. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata.
- b. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab.
- d. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industry dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat.



- f. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen.

G. Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayananan umum.

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan.
- b. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industry kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
- c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Penyelenggaraan industry dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- e. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok.
- f. Pemberian izin industry dan izin kawasan industry.
- g. Pemberian perizinan dibidang industry dan Perdagangan.
- h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengerajin.
- i. Memfasilitasi permodalan bagi industry kecil dalam pengembangan usaha.
- j. Pengendalian pencemaran limbah industry.
- k. Pengawasan dan pengendalian industry dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
- l. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

- m. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan).
- n. Pemberian izin gudang.
- o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.
- p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industry dan perdagangan daerah.
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang industry dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota.
- s. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah.
- t. Perizinan dibidang Industri dan Perdagangan oleh Daerah.
- u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi Industri dan Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha dan jasa Industri dan Perdagangan
- w. Penyelenggaraan Sistem Industri dan Perdagangan.
- x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama Industri dan Perdagangan.
- z. Penyelenggaraan Perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah.

H. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

- i. Pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Program;

2. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

- g. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).

- d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- f. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- g. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.

- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitasi barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda daftar industry.
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
- d. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data,

pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Metrologi.
- b. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- c. Seksi Pengawasan Perindustrian.

7) Seksi Pengawasan Metrologi

Seksi Pengawasan Metrologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrolagian.
- b. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrology.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi Pengawasan Perdagangan

Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional
- c. Pengkoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Pengawasan Perindustrian

Seksi Pengawasan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan pemyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat.
- c. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.

- e. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- f. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
- g. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
- b. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan SuratKeterangan Asal Barang (SKAB), serta

pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri.

- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
- e. pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 1. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
 2. Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

11) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- e. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
- f. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
- g. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri;
- h. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

- e. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
- f. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
- g. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri;
- h. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dalam

melaksanakan rincian tugas sebagaimana Pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah Kota.
- b. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
- c. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barangbarang impor dan yang akan diekspor.
- d. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Umum.

- 
- e. Pemrosesan permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) Umum.
 - f. Pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor;.
 - g. Penyusunan program kerja.
 - h. Pelaksanaan pelayanan umum.
 - i. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
 - j. Penginventarisasian permasalahan dan penyediaan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 14) Bidang Pasar Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
- dalam Pasal 33 menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
 - b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
 - c. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.

- d. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- j. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
- k. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.

- n. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 1. Bidang Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.
 - c. Seksi Retribusi.
 2. Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.
- 15) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar.
- c. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.
- d. Penyusunan program kerja.
- e. Pelaksanaan pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.

- g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- i. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.
- k. Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16) Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
- c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.

- d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.

- p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima. q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17) Seksi Retribusi

Seksi Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar.
- c. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi.
- d. Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.
- e. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
- f. Penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- g. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- h. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- i. Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait.
- j. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- k. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

- l. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
- n. pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industry.
- b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
- c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
- d. Promosi produk industry.
- e. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri;
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi.
- g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industry.

- h. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan;
- i. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama.
- j. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri kreatif.
- k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industry.
- l. Pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industry.
- m. Penyusunan tata ruang industry.
- n. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry.
- o. Pendataan, analisis dan desiminasi data industry.
- p. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industry.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 1. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 - b. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
 2. Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

19) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan Rencana Kegiatan.
- b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
- c. Perumusan dan pelaksanaan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Industri Kreatif
- d. Penyiapan bahan bimbingan penggunaan bahan-bahan baku dan bahan penolong.
- e. Penyusunan bimbingan teknis, terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang modal serta pengembangan diversifikasi produk.
- f. Penyediaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- g. Pembinaan terhadap asosiasi industri/Dewan Industri Daerah.
- h. Perumusan dan penetapan standar kompetensi SDM industri dan membentuk aparatur pembina industri daerah.
- i. Penyiapan dan pengusulan diklat SDM Industri dan aparatur pembina industry.
- j. Penyusunan bahan bimbingan pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku/bahan pembantu.

- k. Perumusan dan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi bidang industry.
- l. Perumusan dan pelaksanaan sosialisasi teknologi bidang industry.
- m. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20) Seksi Sarana dan Usaha Industri

Seksi Sarana dan Usaha Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan.
- b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
- c. Perumusan dan penciptaan industri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya.
- d. Pemberian rekomendasi usaha industri/pindah usaha industri/perluasan usaha industri dan Kawasan Industri.
- e. Pemberian perlindungan kepastian berusaha.
- f. Penetapan bidang usaha industri unggulan dan prioritas daerah.
- g. Pelaksanaan promosi produk industri daerah.
- h. Perumusan pembinaan dan pengembangan sarana dan kemampuan industry.
- i. Pengajuan pembentukan UPTD/Unit Usaha industry.

- j. Penyusunan rencana kerja industri meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana jangka panjang bidang industry.
- k. Perumusan dan penyusunan tata ruang industry.
- l. Pelaksanaan pendataan, analisis dan desiminasi data serta pelaporan ke pemerintah propinsi.
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan.
- n. Pelaksanaan pembinaan HKI dan desain produk industry.
- o. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi standarisasi bidang industry.
- p. Penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pemutahiran data industri kecil menengah dan besar, serta bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB), GKM dan SNI/ISO-9000. 52
- q. Pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha industry.
- r. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Seksi Kerjasama dan Informasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan.
- b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.

- c. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar usaha industry.
- d. Perumusan kegiatan dan pelaksanaan promosi produk industry.
- e. Perumusan peningkatan dan pengembangan sistem informasi industri bagi kalangan internal dan eksternal.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan, kerjasama dalam pengembangan industri antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
- g. Perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industry.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industry.
- i. Pengkoordinasian pembinaan agro industri serta industri hasil hutan.
- j. Pengkoordinasian pembinaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- k. Pelaksanaan pelayanan umum.
- l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengembangan peluang investasi sector industri, agro industri, industri hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- n. Pelaksanaan koordinasi perumusan pembinaan industri kecil.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas responden sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang di berikan kepadanya dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	2	14,28%
2.	DIPLOMA	3	21,42%
3.	Strata Satu (S1)	5	35,72%
4.	Strata Dua (S2)	4	28,58%
Jumlah		14	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 2 orang atau 14,28%, diploma sebanyak 3 orang atau 21,42%, sarjana sebanyak 5 orang atau 35,72%, dan pascasarjana sebanyak 4 orang atau 28,58%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak adalah sarjana yaitu sebanyak 5 orang.

2. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam befikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	7	50,00%
2.	31 – 40	5	35,72%
3.	41 – 50	1	7,14%
4.	>51	1	7,14%
Jumlah		14	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 7 orang atau 50%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 5 orang atau 35,72%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 7,14%, dan yang

berumur >50 tahun sebanyak 1 orang atau 7,14%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah cukup dewasa yang di jadikan responden sebanyak 7 orang atau 50% sudah berumur 21-30 tahun.

3. Tingkat Masa Kerja

Tingkat masa kerja menentukan dalam pengalaman dari setiap pegawai dalam mengambil tindakan, semakin tinggi tingkat masa kerjanya maka akan besar kemungkinan seorang pegawai memiliki pengalaman yang tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat masa kerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.3 Tingkat Masa Kerja Responden

No	Tingkat Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1.	6 – 10	7	50%
2.	11 – 15	4	28,58%
3.	16 – 20	2	14,28%
4.	21 – 25	1	7,14%
5.	26 - 30	-	-
6.	>31	-	-
Jumlah		14	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang tingkat masa kerja 6-10 tahun adalah sebanyak 7 orang atau 50%, yang masa kerja 11-15 tahun sebanyak 4 orang atau 28,58%, yang masa kerja 16-20 tahun sebanyak 2 orang atau 14,28%, yang masa kerja 21-25 tahun sebanyak 1 orang atau 7,14%, dan tidak ada responden dengan tingkat masa kerja di atas 26 tahun.

B. Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. (Miftah Thoha, 2010: 207).

Sedangkan menurut Ismail (2001: 154) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.

Untuk melihat Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pemberian Bimbingan

Pemberian Bimbingan merupakan suatu proses bantuan secara Sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan yang diberikan kepada seorang, kelompok atau masyarakat agar bisa membuat keputusan, memecahkan masalah, dan bisa memahami diri dan lingkungannya sehingga dapat menyesuaikan diri dimanapun ia berada serta dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.

Berkenaan dengan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam upaya seperti dalam bentuk menunjuki, upaya mengiring, dan upaya mendorong Industri kecil di Kota Pekanbaru..

Sehubungan dengan indikator pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam rangka Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di ukur beberapa sub indikator pemberian bimbingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.4 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dilihat Dari Indikator Pemberian Bimbingan

No	Pemberian Bimbingan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya Upaya Memberikan Petunjuk	5	6	3	14
		35,72%	42,85%	21,43%	100%
2	Adanya Upaya Mengajak	2	6	6	14
		14,30%	42,85%	42,85%	100%
3	Adanya Upaya Memberikan Saran	3	7	4	14
		21,42%	50%	28,58	100%
Jumlah		10	19	13	42
Rata-Rata		3,33	6,33	4,33	14
Persentase		23,82%	45,24%	30,94%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator pemberian bimbingan

diketahui tentang Apakah upaya yang dilakukan dinas dalam memberikan petunjuk program pembinaan, bahwa responden menjawab jelas sebanyak 5 orang dalam persentase yaitu 35,72%, kemudian jawaban responden mudah dipahami sebanyak 6 orang dalam persentase 42,85%, dan jawaban responden kurang dapat dipahami berjumlah 3 orang dengan persentase 21,43%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator pemberian bimbingan yang pertama mudah dipahami.

Kemudian jawaban responden tentang Apa upaya dari dinas dalam mengajak masyarakat dalam mengikuti program pembinaan, responden yang menjawab jelas berjumlah 2 responden dengan persentase 14,30%, responden yang menjawab mudah dipahami berjumlah 6 orang dengan persentase 42,85%, dan responden yang menjawab kurang dapat dipahami berjumlah 6 responden dalam persentase 42,85%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator pemberian bimbingan yang kedua juga mudah dipahami.

Kemudian jawaban responden tentang Apa upaya dari dinas dalam memberikan saran kepada pedagang, responden yang menjawab jelas berjumlah 3 responden dengan persentase 21,42%, responden yang menjawab mudah dipahami berjumlah 7 orang dengan persentase 50%, dan responden yang menjawab kurang dapat dipahami berjumlah 4 responden dalam persentase 28,58%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator pemberian bimbingan yang ketiga juga mudah dipahami.

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan dalam Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator pemberian

bimbingan sudah cukup baik tapi tetap perlu ditingkatkan dalam upaya dinas mengajak masyarakat dalam pembinaan industry kecil sehingga pemberian bimbingan benar-benar berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Jam 09. 42 Wib, mengenai indikator pemberian bimbingan, yaitu:

Ya kalau masalah pembinaan, kami melakukan pelatihan terhadap masyarakat yang mempunyai industry kecil, sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri benar-benar tepat sasaran. Dan kami juga memberikan bantuan untuk peralatan bagi setiap industry kecil yang ada di Kota Pekanbaru.

Ditambah dari Hasil yang didapatkan dari sesi wawancara dengan pedagang Industri Kecil Pada bulan 12 tahun 2018, penulis menarik kesimpulan :

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perindustrian sudah cukup baik, yang mana para pembina memberikan arahan kepada Pedagang disaat mereka (pedagang) membutuhkan arahan kearah yang lebih baik ditambah lagi Pembina memberikan modal awal kepada pedagang yang membutuhkan sebesar Rp. 5.000.000,- . Hal ini dilakukan agar pedagang tidak merasa diacuhkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisisioner dan wawancara mengenai indikator pemberian bimbingan dalam Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sudah baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner responden dengan persentase 45,24% dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Supervisi

Supervisi yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam bentuk pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, seperti setelah melakukan pembinaan berupa pelatihan, penyuluhan, lalu dilakukan bimbingan serta diawasi jalannya usaha industri kecil tersebut.

Berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam bentuk pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, seperti setelah melakukan pembinaan berupa pelatihan, penyuluhan, lalu dilakukan bimbingan serta diawasi jalannya usaha industri kecil tersebut.

Jawaban responden tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di ukur dari indikator supervisi dengan beberapa sub indikator dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.5 Frekuensi Jawaban Responden Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dilihat Dari Indikator Supervisi

No	Supervisi	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Keseriusan Peserta	3	8	3	14
		21,43%	57,14%	21,43%	100%
2	Motivasi dan Partisipasi	9	3	2	14
		64,29%	21,43%	14,28%	100%
3	Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung	4	6	4	14
		28,57%	42,86%	28,57%	100%

Jumlah	16	17	9	42
Rata-Rata	5,33	5,67	3	14
Persentase	38,07%	40,50%	21,43%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat di lihat dari indikator supervisi, diketahui Apakah pegawai dinas sudah serius dalam memberikan petunjuk program pembinaan, responden yang menjawab serius sebanyak 3 orang dalam persentase 21,43%, kemudian jawaban responden cukup serius sebanyak 8 orang dalam persentase 57,14%, dan jawaban responden yang kurang serius berjumlah 3 orang dengan persentase 21,43%. Jadi rata-rata pegawai dinas sudah cukup serius dalam memberikan petunjuk tentang program pembinaan industry kecil.

Kemudian jawaban responden tentang Apakah pengawasan langsung dan tidak langsung dari dinas terkait program pembinaan sangat membantu, responden yang menjawab sangat membantu sebanyak 9 orang dalam persentase 64,29%, kemudian jawaban responden cukup membantu sebanyak 3 orang dalam persentase 21,43%, dan jawaban responden kurang membantu berjumlah 2 orang dengan persentase 14,28%. Jadi rata-rata responden menjawab sangat membantu, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung sangat membantu program pembinaan industry kecil.

Selanjutnya jawaban responden tentang Mungkinkah motivasi bisa membantu program pembinaan industry kecil yang ada di kota pekanbaru, responden yang menjawab sangat membantu sebanyak 4 orang dalam persentase

28,57%, kemudian jawaban responden cukup membantu sebanyak 6 orang dalam persentase 42,86%, dan jawaban responden kurang membantu berjumlah 4 orang dengan persentase 28,57%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup membantu, hal ini menunjukkan bahwa motivasi cukup membantu program pembinaan industry kecil.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi yang dilakukan dalam rangka Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sesuai dengan hasil di atas dapat disimpulkan sudah cukup baik untuk indikator supervisi berada pada kategori cukup baik namun harus lebih dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Aneka Industri pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Jam 14.05 Wib, mengenai indikator super visi, yaitu:

Kalau masalah keseriusan, sudah tentu kami dari pihak dinas benar-benar serius dalam hal ini, apalagi dalam pembinaan industry kecil, karena tidak sedikit dana yang kami berikan kepada masyarakat dalam pelatihan dan bantuan peralatan, dan memang benar motivasi dari kami seperti itulah sangat mempengaruhi dan membantu dalam proses pembinaan.

Ditambah dari Hasil yang didapatkan dari sesi wawancara dengan pedagang Industri Kecil Pada bulan 12 tahun 2018,penulis menarik kesimpulan :

Para Pembina memang sudah serius dalam menarik minat pedagang agar dapat berpartisipasi dalam Proses Pembinaan, dan juga pembina sudah serius dalam memberikan modal sesuai bentuk industri yang dijalankan tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa program pembinaan yang dilakukan ini

kurang efektif dan terkadang motivasi yang diberikan hanyalah sebatas motivasi yang tidak ditunjukkan dengan adanya praktek sebenarnya .

Maka dari hal itu, Penulis Mengambil kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisisioner dan wawancara mengenai indikator super visi dalam Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan cukup baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner responden dengan persentase 40,50% dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

3. Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yaitu Koordinasi antara industri kecil kepada pihak Dinas dalam rangka melaksanakan program pembinaan tersebut, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara yang membina dan yang dibina.

Berkenaan dengan koordinasi antara industri kecil kepada pihak Dinas dalam rangka melaksanakan program pembinaan tersebut, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara yang membina dan yang dibina.

Sehubungan dengan indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh pegawai kedinasan dalam rangka Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru di ukur beberapa sub indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.6 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dilihat Dari Indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

No	Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi dari atasan dengan Bawahan	10	4	-	14
		71,43%	28,57%	-	100%
2	Komunikasi antara yang dibina dengan yang dibina	7	4	3	14
		50%	28,57%	21,43%	100%
Jumlah		17	8	3	28
Rata-Rata		8,5	4	1,5	14
Persentase		60,71%	28,57%	10,72%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat di lihat dari Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dapat diketahui Apakah tingkat Komunikasi antara/dari atasan dengan bawahan bisa menjadi panutan terhadap Program pembinaan antara yang membina dan dibina, bahwa responden menjawab sangat membantu sebanyak 10 orang dalam persentase yaitu 71,43%, kemudian jawaban responden cukup membantu sebanyak 4 orang dalam persentase 28,57%, dan tidak ada responden yang menjawab kurang membantu. Jadi rata-rata jawaban responden sangat membantu.

Kemudian jawaban responden tentang disaat melakukan program pembinaan,, apakah pegawai yang melakukan pembinaan mudah memberikan balasan komunikasi kepada yang dibina, responden yang menjawab sangat merespon sebanyak 7 orang dalam persentase yaitu 50%, kemudian jawaban responden cukup merespon sebanyak 4 orang dalam persentase 28,57%, dan jawaban responden kurang merespon berjumlah 3 orang dengan persentase 21,43%. Jadi rata-rata responden menjawab sangat merespon, hal ini menunjukkan bahwa sudah baik komunikasi yang dilakukan oleh pegawai dinas dalam program pembinaan industry kecil.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa indicator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sesuai dengan hasil di atas dengan rata-rata persentase 60,71% berada pada kategori baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Aneka Industri pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Jam 10.00 Wib, mengenai indikator super visi, yaitu:

Pasti, sebab baik dalam proses pembinaan ataupun tidak komunikasi antara atasan dan bawahan sangat diperlukan agar berjalan dengan baik pembinaan yang dilakukan. Kalau masalah balasan komunikasi kami dari pihak dinas khusus nya pegawai pasti akan merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisiner dan wawancara mengenai indikator Konsultasi Pelkasanaan Urusan Pemerintahan dalam Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sudah baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisiner responden dengan persentase 60,71% dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dari keseluruhan indikator dapat dirangkumkan jawaban responden dalam sebuah tabel rekapitulasi di bawah ini :

Tabel V.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Evaluasi Pelaksanaan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pemberian Bimbingan	3,33	6,33	4,33	14
		23,82%	45,24%	30,94%	100%
2.	Supervisi	5,33	5,67	3	14
		38,07%	40,50%	21,43%	100%
3.	Konsultasi Pelkasanaan Urusan Pemerintahan	8,5	4	1,5	14
		60,71%	28,57%	10,72%	100%
Jumlah		17,16	16	8,83	42
Rata-Rata		5,72	5,33	2,95	14
Persentase		40,86%	38,07%	21,07%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi jawaban responden tentang analisis penyelenggaraan pembinaan industri usaha kecil oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dengan menggunakan indikator pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi di dapat rata-rata responden membemberikan tanggapan pada kategori baik yaitu 5,72 orang responden dengan persentase 40,86% dan pada kategori cukup baik yaitu 5,33 orang dengan rata-rata persentase 38,07% dan yang menjawab kurang baik 2,95 orang responden dengan persentase 21,07%.

Ada pun jawaban yang di dapatkan diatas dapat dikatakan menjadi jawaban kesimpulan pada penelitian ini, hal ini didasari fakta yang ada dilapangan bahwa memang penyelengaraan pembinaan industri usaha kecil belum berjalan dengan maksimal dimana penulis masih melihat adanya kekurangan dari penyelenggaraan tentang program pembinaan yang di lakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru

C. Hambatan Hambatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Adapun hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya permintaan modal usaha dari industri kecil yang menghambat program pembinaan yang akhirnya membuat program pembinaan itu kurang terlaksana.

2. Karna Masih banyaknya Industri Kecil di Kota Pekanbaru yang belum terdata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengakibatkan urusan pembinaan menjadi terhambat dan terkadang hanya industri kecil tertentu saja yang mengikuti program pembinaan tersebut



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Sesuai hasil penelitian bahwa: untuk indikator pemberian berada pada kategori cukup baik hanya perlu ditingkatkan dengan persentase 45,24%, untuk indikator supervisi sudah cukup baik dengan persentase 40,50%, dan untuk indikator waktu berada pada kategori baik dengan persentase 60,71%. Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan teknik pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dari keseluruhan indikator berada pada kategori baik dengan persentase 40,86%.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut : Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya untuk dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru benar-benar serius dalam melakukan program pembinaan industry kecil yang ada di kota pekanbaru, sehingga tidak ada lagi industry kecil yang tidak dibawah binaan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, dan penulis sarankan

agar kebijakan tersebut disosialisasi tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota tapi juga dilaksanakan di tingkat Kecamatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Badan Penerbit FISIPOL, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru : UIR
- Bagong, Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Brantakusumah, Deddy Supriady,2005. *Perencanaan Pembangunan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dunn,william N,1999,*analisa kebijakan Publik*,Yogyakarta.Hanin Dita.
- Edwar George III,2009,*Implementasi kebijakan Publik*,Yayasan Pembaharuan Adminitrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Fajlurrahman, & Masriadi, 2010. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Handoko TH, 1992. *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Libberty, Yogyakarta.
- Ike Kusdyah, 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Indah Puji Hartik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM)*, Laksana, Jogjakarta.
- Jono Munandar, 2014. *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, IPB, Bogor
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalial*, Gadjah Mada University Press, Medan
- Moekijat, 2005.*Pengembangan organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju
- PressSaparin,sumber,1986.*tata pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen P. And Timothy A. Judge, 2011. *Organizational Behavior*, New Jersey, Pearson Education, Inc.
- Sufian, 2005, *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press.

- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sunyoto, Danang 2012, *manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, CAPS.
- Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Wasistiono Sadu & Rauf Rahyunir, 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.
- Wibowo, 2013. *Perilaku dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Wirman, Syafri, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, PT. Gelora Aksara, Jatinangor.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Peraturan Walikota No.114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru